

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI DESA TEGAL KERTHA DENPASAR**

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa¹

¹Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: jonathanlatupeirissa@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Community engagement in local government administration refers to the active involvement of the community in expressing their desires, ideas, and concerns in the management of local government affairs. Villages possess the entitlement to undertake development, including the establishment of infrastructure and facilities required by the community. Active engagement and participation of the community in village development is crucial. This serves as a means of collaboration between the government and the community, fostering effective cooperation to promote regional progress. Tegal Kertha Village, situated in Denpasar City, carries out development planning in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2014. The objective of this study is to assess the level of community involvement in the development process inside Tegal Kertha Village. The research employed a qualitative methodology with a descriptive approach. The data was obtained from both primary and secondary sources, utilizing observation and interviews as data collection approaches. The data analysis was conducted using the Miles and Huberman method. The research findings regarding community participation in village development in Tegal Kertha Village indicate that the implementation and evaluation stages of Tegal Kertha Village development have been effectively carried out, with active involvement of the community. As a result, the community expresses satisfaction with the performance of the village government.

Keywords: participation; public; village development.

ABSTRAK

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan keinginan, gagasan, dan kepeduliannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa memiliki hak untuk melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting. Hal ini menjadi sarana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, membina kerja sama yang efektif untuk mendorong kemajuan daerah. Desa Tegal Kertha yang terletak di Kota Denpasar, melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Tegal Kertha. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai pendekatan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tegal Kertha menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa Tegal Kertha telah dilakukan secara efektif, dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Hasilnya, masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata kunci: partisipasi; masyarakat; pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Tujuan mendasar dari pembangunan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dicontohkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional diupayakan secara khusus berfokus pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya (Ginanjari, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan wujud nyata dari kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab masyarakat terhadap arti penting pembangunan yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan menumbuhkan kolaborasi di dalam masyarakat, menjadi jelas bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi partisipasi aktif masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Nismawati, 2020

Masa depan akan membawa tantangan yang lebih besar bagi pembangunan desa karena ekonomi regional yang lebih liberal dan sistem politik yang lebih partisipatif. Namun demikian, desa masih harus bertransisi dari kondisi keterbelakangan dan kemiskinan sebelumnya. Meskipun diakui secara luas bahwa desa memiliki fungsi yang signifikan di daerah perkotaan, desa masih dianggap lebih rendah dalam hal ekonomi dan atribut lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pembangunan desa harus menjadi perhatian utama dalam semua rencana strategis dan program pembangunan di Indonesia (Hernowo, 2004).

Menurut Pasal 1, Ayat 41 UU No. 23 Tahun 2014, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan keinginan, gagasan, dan keprihatinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat merupakan aspek fundamental dari otonomi daerah, dan sangat penting bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Implementasi UU Desa telah berkontribusi pada upaya kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU No. 6/2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikarenakan desa memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai, sehingga memungkinkan pembangunan yang cepat dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat. Keberhasilan upaya pembangunan, terlepas dari skalanya, pada dasarnya tergantung pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. (Nismawati, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengacu pada keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam menyampaikan keinginan, gagasan, dan kepedulian mereka terhadap pengelolaan urusan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri. Hal ini termasuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara efisien, jujur, dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi Masyarakat (Adam & Isnaini, 2022). Hal ini juga diterapkan oleh Desa Tegal Kertha. Desa Tegal Kertha merupakan desa yang terletak di Denpasar. Desa Tegal Kertha telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang diteliti oleh Mahadi & Dwi (2015) yang berjudul "Evaluasi Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar". Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi. Selain itu terdapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tegal Kertha yaitu lemahnya pemahaman peraturan dari perencanaan dan penganggaran, kurangnya kapasitas staf dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, dan lemahnya keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kemajuan daerah pedesaan. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk membina kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan kemitraan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah. Sebaliknya, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjunjung tinggi harga diri mereka. Pemerintah percaya bahwa mereka dapat mengembangkan daerahnya secara mandiri, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, sementara masyarakat tidak tertarik dengan urusan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tegal Kertha Denpasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengikuti ideologi postpositivisme. Penelitian ini digunakan oleh peneliti dalam setting kehidupan nyata, di mana peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2019). Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari total 5 orang, termasuk 2 orang administrator desa dan 3 orang anggota masyarakat desa. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Model Miles dan Hiberan (dalam Sugiyono, 2019) menggunakan pendekatan analisis data yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini menekankan pentingnya melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tegal Kertha adalah:

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tegal Kertha

Implementasi mengacu pada pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan komprehensif. Dalam konteks implementasi pembangunan, Koentjaraningrat (I Nyoman, 2010) menyarankan agar masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dan didorong untuk berpartisipasi. Pelibatan masyarakat umumnya dipandang sebagai komponen integral dari upaya pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan ini. Hal ini membutuhkan kolaborasi dan akuntabilitas dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan kelancaran pelaksanaan pilihan yang telah disepakati.

Dalam program pembangunan desa, sangat penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat tidak hanya untuk mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan, tetapi juga untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat menentukan apakah pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dapat mencapai tujuannya atau tidak. Selain itu, untuk memupuk rasa kebersamaan dan transparansi, diharapkan kemajuan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembangunan di Desa Tegal Kertha, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah penting untuk melibatkan aktif masyarakat. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan mendalam, karena pemerintah desa memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Sejak awal, perwakilan masyarakat telah diikutsertakan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pembangunan.

Melibatkan masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa berupaya untuk

menjembatani kesenjangan informasi. Langkah ini tidak hanya bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana program-program pembangunan dijalankan, tetapi juga untuk memperkuat keterbukaan pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Selain itu, keterlibatan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kepercayaan yang lebih dalam antara pemerintah desa dan warganya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggungjawab pemerintah desa, masyarakat diharapkan akan lebih terlibat secara aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan program, tetapi juga meminimalisir potensi ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat.

Pentingnya evaluasi terbuka dan akuntabel juga menjadi landasan bagi kerjasama berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi memberikan mereka ruang untuk menyuarakan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait pembangunan. Inisiatif ini menciptakan suasana di mana masyarakat merasa dihargai dan didengar, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merancang masa depan desa yang lebih baik.

Meskipun langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Desa Tegal Kertha tampak positif, diperlukan juga analisis kritis terhadap beberapa aspek. Pertama-tama, perlu dipertimbangkan sejauh mana perwakilan masyarakat yang terlibat benar-benar mewakili kepentingan seluruh komunitas. Ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok atau lapisan masyarakat mungkin tidak sepenuhnya terwakili, sehingga perlu ditingkatkan mekanisme agar semua suara dapat didengar.

Selanjutnya, sejauh mana informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar transparan dan jelas? Terkadang, informasi yang diberikan dapat bersifat selektif atau tidak mencakup semua aspek pembangunan, yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengamati tingkat keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari segi keberlanjutan, perlu juga dievaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Apakah partisipasi ini hanya bersifat seremonial atau benar-benar memengaruhi keputusan pembangunan? Dibutuhkan evaluasi periodik untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Selain itu, kebijakan evaluasi terbuka dan akuntabel perlu dikritisi lebih lanjut. Bagaimana pemerintah desa menanggapi kritik dan saran dari masyarakat? Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa hasil evaluasi diintegrasikan ke dalam kebijakan lebih lanjut? Evaluasi yang efektif tidak hanya menciptakan forum untuk mengemukakan masalah, tetapi juga menyediakan solusi yang dapat diimplementasikan. Penting juga untuk menggali lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari keterlibatan masyarakat. Apakah terjadi perubahan dalam pola pikir dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan lokal? Analisis ini dapat membantu menilai sejauh mana pendekatan ini membangun kapasitas masyarakat dan menciptakan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan.

Dengan menyelidiki aspek-aspek ini secara kritis, kita dapat memastikan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Tegal Kertha bukan hanya simbolis, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan Desa Tegal Kertha

Evaluasi adalah salah satu tugas manajemen. Evaluasi adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai keefektifan dan efisiensi suatu rencana program. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mendokumentasikan dan menilai kejadian, menentukan penyebabnya, dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi situasi tersebut. Lebih jelasnya, evaluasi adalah upaya untuk memastikan adanya korelasi antara program

yang diimplementasikan dengan hasil yang dicapai, serta komponen-komponen yang mempengaruhinya (Bryant dan White, 1987).

Keberhasilan suatu proyek pembangunan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat secara aktif, yang meliputi sumbangsih pemikiran, pelaksanaan rencana, pemantauan kemajuan, dan evaluasi hasil. Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan program bergantung pada keterlibatan aktif setiap individu dalam masyarakat. Sosialisasi merupakan tahap awal untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan melaksanakan program pembangunan secara efektif, sehingga program pembangunan dapat mencapai keberhasilan. Hasil evaluasi akan memainkan peran penting dalam tahap akhir program pembangunan desa. Tujuan dari penilaian program adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program yang telah dirumuskan.

Analisis mendalam terhadap partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Desa Tegal Kertha mengungkapkan beberapa aspek krusial. Pertama, keterlibatan penuh masyarakat, melalui perwakilan mereka, dalam evaluasi hasil-hasil pembangunan merupakan langkah positif menuju pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan suara kepada warga desa dalam mengevaluasi keberhasilan proyek-proyek pembangunan, desa menciptakan dinamika partisipatif yang mengarah pada penerimaan lebih luas terhadap hasil-hasil tersebut.

Keberhasilan ini tampak tercermin dalam kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan manfaat program-program pembangunan telah memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai efektivitas upaya pembangunan desa. Dengan merasa puas, masyarakat cenderung lebih terlibat dalam mendukung dan memelihara infrastruktur atau inisiatif pembangunan yang telah direalisasikan. Ini menciptakan siklus positif di mana kepuasan masyarakat menjadi pendorong untuk keterlibatan yang lebih besar dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam evaluasi juga memainkan peran penting dalam membangun rasa tanggungjawab bersama. Masyarakat tidak hanya merasa sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian integral dari kesuksesan pembangunan desa. Dengan merasakan dampak nyata dari partisipasinya, masyarakat cenderung menginternalisasi tanggungjawab terhadap pembangunan desa. Hal ini menciptakan koneksi emosional antara masyarakat dan inisiatif pembangunan, menjadikan mereka mitra yang lebih aktif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan pada tahap berikutnya.

Dalam konteks ini, peran perwakilan masyarakat menjadi kunci dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara efektif kepada pemerintah desa. Dengan pemberdayaan perwakilan ini, masyarakat dapat yakin bahwa suaranya didengar dan diwakili dengan baik dalam forum evaluasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Sebagai kesimpulan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Desa Tegal Kertha tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan proyek-proyek pembangunan, tetapi juga menciptakan fondasi kuat untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan merasa puas dan bertanggungjawab, masyarakat dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh komunitas dalam proses perencanaan dan implementasi

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan di Desa Tegal Kertha menciptakan dinamika positif yang melibatkan warga desa secara penuh dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat, melalui perwakilan mereka, tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan proyek-proyek pembangunan, tetapi juga membangun kepuasan dan rasa tanggungjawab bersama. Kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan menciptakan keyakinan yang lebih besar dalam efektivitas upaya pembangunan desa, sementara rasa tanggungjawab bersama mengubah masyarakat menjadi mitra aktif dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan berikutnya. Dengan pemberdayaan perwakilan masyarakat, partisipasi ini bukan hanya formalitas, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi aspek penting dalam evaluasi, tetapi juga fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan melibatkan seluruh komunitas.

REFERENSI

- Agustin, Merry. (2015). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang." *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4(1):1–14.
- Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani Suprpto, and Surati Surati. (2018). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo." *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)* 6(2):135. doi: 10.31314/pjia.6.2.135-142.2017.
- Harnoko, Darto, Yustina Nurwanti, Y. Twikromo, A. A. Wirawan, Ernawati Purwaningsih, Siti Munawaroh, Ivanovich Augusta, Surwadi Endraswara, and Taryati. (2008). "Pembangunan Desa." *Janta III*:391–500.
- Mahadi, LAlu Arman, Piers Andreas Noak, and Kadek Wiwin Dwi. (2015). "Evaluasi Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar." *Open Journal System* 1(2):1–12.
- Mondong, Hendra. (2013). "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5(1):1–18.
- Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara. (2021). "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3(2):192–200. doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- Samaun, Riyanti, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah. (2022). "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara." *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1(1):18–33. doi: 10.59713/jipik.v1i1.18.